

SIKAP SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR TERHADAP KEHADIRAN IBU KOTA NEGARA BARU

Moch Zein Syihabul Millah¹, Agus Machfud Fauzi²

¹Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISIPOL-Unesa

e-mail: mochzein.22171@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Developments regarding the relocation of the national capital through appropriate studies and studies from among existing perspectives, there is a positive potential to be found in the policy of moving the capital city, increasing equity in the economic sector which is not only focused on one regional development but in several other cities which are included in the territory of the Republic of Indonesia "The Unitary State of the Republic of Indonesia". Now in the capital city of Jakarta, the rate of development of growth centers is very high, far surpassing other large islands such as Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and Papua. The relocation of the capital city as far as possible refers to economic connectivity as a trigger to increase the economy of other islands in Indonesia. With the transfer of IKN, it is hoped that socio-culture can be mixed and can support each other between cultures, which were originally in East Kalimantan with the arrival of immigrants from the city of Jakarta. that has been carried out by the government and the benefits of the research studied in this paper in order to have a broad insight into people's behavior. The results in this study found the attitude of the people who accepted the existence of a new capital city to be built in East Kalimantan, both ethnicity and customs. because previously it didn't have a bad track so acceptance was easy to happen.

Keywords: Kalimantan; Society; State; Culture; City

Abstrak

Perkembangan tentang adanya pemindahan ibu kota negara melalui studi dan kajian yang tepat dari antara perspektif yang ada ada potensi positif yang didapatkan pada kebijakan pemindahan ibu kota tersebut meningkatnya pemerataan sektor ekonomi yang tidak hanya terpaku kepada satu pembangunan wilayah namun di beberapa kota lainnya yang termasuk di wilayah NKRI "Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sekarang di Ibu Kota Jakarta tingkat perkembangan pusat pertumbuhan sangat tinggi jauh melampaui pulau-pulau besar lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Pemindahan ibu kota sedapat mungkin agar mengacu pada konektivitas perekonomian sebagai trigger meningkatkan perekonomian pulau-pulau lain di Indonesia. Dengan adanya pemindahan IKN diharapkan sosial budaya dapat tercampur dan bisa saling mendukung antar budaya yang awal di Kalimantan timur dengan adanya pendatang dari kota Jakarta salah satunya, penelitian ini mengacu dan menghasilkan pemahaman atas bagaimana sikap masyarakat dan suku-suku yang di Kalimantan menerimanya dari hasil keputusan dan pertimbangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah serta manfaat pada penelitian yang dikaji pada penulisan ini agar memiliki wawasan yang luas terhadap perilaku masyarakat. Hasil dalam penelitian ini menemukan sikap masyarakat yang menerima adanya ibu kota baru untuk dibangun di Kalimantan Timur baik itu suku dan adat istiadat. karena sebelumnya tidak mempunyai jejak buruk sehingga penerimaan itu mudah sekali terjadi pada hal ini.

Kata Kunci : Kalimantan, Masyarakat ,Negara, Budaya

1. Pendahuluan

Ibu kota negara atau yang disebut sekarang adalah IKN merupakan bagian dari provinsi ataupun tepat administratif yang menjadi tempat kedudukan pusat pergerakan administrasi negeri, baik dari sektor individu maupun kelompok, pergerakan ekonomi di Indonesia sekarang masih terpusat di bagian Jawa masih belum merata secara penuh. Ibu kota mempunyai peranan penting dalam aspek kegiatan pemerintahan, mempunyai fungsi utama yakni pusat kekuasaan politik, ibu kota juga mencerminkan sisi karakter atau ciri khas yang unik dalam

Kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara merupakan upaya dalam mendorong pemerataan sektor pembangunan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya yang telah menjadikan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan negara dapat dikatakan maju dan berkembang apabila ada pembangunan serta pemikiran yang tepat bahkan tidak merugikan pihak tertentu, dalam pengelolaan ibu kota merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan perhitungan supaya tidak memunculkan permasalahan yang dihadapi.

Tanggal 29 April 2019 Bapak Jokowi Widodo berencana untuk melakukan pemindahan ibu kota keluar Jawa sebagian kabupaten penajam Paser Utara dan sebagian kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2019. Wacana pemindahan Jakarta ke Kalimantan Timur karena banyak permasalahan tidak dapat diselesaikan pemerintah. Pemaparan pada badan perencanaan pembangunan nasional (repository)

Sektor Ibu Kota Negara dapat diyakini sebagai sektor yang mampu memberi kontribusi dalam peningkatan ekonomi negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu Pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara sangat berdampak sekali bagi warga sekitar yang ada di Kalimantan Timur. Pemindahan tersebut membuat tambahan inflasi nasional yang minimal walaupun pemindahan ibu kota baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan, pemindahan juga mendorong investasi baru di provinsi Kalimantan Timur yang menjadikan pelaku investor mempunyai banyak pilihan lokasi strategis dalam pembangunan di dalam negeri baik secara internal maupun eksternal

Berbagai alasan yang ada pada ibu kota yang sekarang yang bertempat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadikan pertimbangan khusus karena ada berbagai faktor yang menjadikan IKN tersebut layak untuk dipindahkan yakni dari potensi bencana alam yang dimana Kalimantan Timur dianggap tidak rawan gempa karena tidak memasuki ring of fire di Indonesia, kondisi alam terbuka hijau masih luas, penduduk permukiman yang tidak terlalu padat seperti di DKI Jakarta, krisis air bersih menurut data kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) 2016, Jawa

mengalami Krisis air yang termasuk para ada berbagai daerah yang mengalami indicator berwarna kuning mengalami tekanan ketersediaan air.

Pemindahan ibu kota ada berbagai hal positif yang akan meminimalkan resiko terjadi bencana dan lokasi yang tergolong lebih strategis dari informasi Liputan 6 (26/08/2019) ada 158 ribu hektar yang memiliki tujuan pemindahan ibu kota juga untuk meratakan penyebaran penduduk karena dari tahun terjadi lonjakan penduduk yang terus menerus memenuhi di area pulau jawa

Kalimantan Timur sudah memiliki struktur sosial yang beragam. Sekitar 1,5 juta pendatang yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI beserta keluarganya, serta pelaku ekonomi lainnya akan hadir di wilayah Ibu kota negara. Oleh karena itu, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur perlu dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang tidak kita inginkan. Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu Indonesia mewujudkan IKN yang bersih serta memiliki penghijauan yang baik

Mendirikan IKN yang baik dan harmonis sesuai dengan karakter negeri Indonesia, yang sangat diperlukan pemahaman dan perencanaan dalam aspek sosial - budaya dan sosial-ekonomi yang matang. Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM (sumber daya masyarakat), pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal yang ada, sumber-sumber kebutuhan masyarakat, menjadikan sebuah peran berbagai individu termasuk generasi muda dalam pembangunan IKN.

Perbedaan karakteristik sosial budaya antara masyarakat setempat dan pendatang perlu diantisipasi sejak awal dan ketahanan masyarakat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya dapat terwujud. “Kearifan ekologi dan kebudayaan masyarakat yang mempengaruhi cara hidup secara turun temurun, harus terus dilestarikan dan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Ibu Kota Negara (Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal hingga Kembangkan Sektor Industri Digital dan Inovasi, 2020)

pihak yang terdampak langsung dari proyek ini sangat banyak, mulai dari warga dan masyarakat adat Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, para ASN pemerintah pusat yang selama ini tinggal di Jakarta, hingga warga Sulawesi Tengah yang harus menghadapi kerusakan lingkungan imbas proyek tambang di wilayahnya demi suplai infrastruktur dan tenaga listrik IKN.(mantalcan,2022)

Data AMAN Aliansi masyarakat Adat Nusantara berdasarkan peta indikatif wilayah adat, hampir semua wilayah baik ditanah bambu, Gunung Mas, dan palangkaraya di Pulau Kalimantan merupakan wilayah adat (Purwaningsih, 2019)

rakyat Kalimantan juga harus dilibatkan dan diinformasikan risiko dan dampaknya sehingga bisa diantisipasi dan diminimalkan dampak dan risikonya jika ibu kota jadi dipindah ke Kalimantan. Bagaimana menjadikan ibu kota negara yang ramah

terhadap masyarakat lokalnya, ramah lingkungan, ramah perempuan dan anak dan ramah lainnya

Lembaga Gemawan dibentuk pada 1999, bertujuan memberdayakan masyarakat desa yang bersifat otonom secara politis, mandiri secara ekonomi, dan hidup dengan mempertahankan kearifan lokal dan mengadopsi kesetaraan gender. Program kerjanya meliputi 14 kabupaten atau kota di wilayah Kalimantan Barat (Widyastuti, 2019)

isu sosial budaya yang akan muncul adalah "*culture shock*". Kebudayaan sosial yang biasa diterapkan pada daerah tersebut mengalami perubahan dalam waktu singkat sehingga terjadi perubahan signifikan yang dapat menciptakan kesenjangan kebudayaan sosial. Dengan akses ibu kota yang memerlukan kecepatan dan ketepatan waktu yang tergolong sibuk inilah yang membuat salah satu efek kejutan akan terjadi, terutama bagi masyarakat sekitar yang terbiasa tidak merasakan dikejar-kejar oleh waktu karena itulah budaya yang sering dirasakan oleh masyarakat kota. Selain itu, ibu kota akan mengundang pekerja dari luar daerah sehingga akan terjadi kecepatan pekerjaan yang terjadi secara cepat yang dapat memberikan efek kejutan masyarakat yang terbiasa saling mengenal dalam satu kampung akan menemui perkumpulan atau orang-orang baru di lingkungan mereka menjadikan awal pemindahan ibu kota. namun efek kaget ini tidak akan selamanya dirasakan oleh masyarakat penajam, hal ini hanya akan dirasakan pada masa awal-awal pemindahan sehingga pada jangka panjang masyarakat akan terbiasa dengan adaptasi dengan situasi ibu kota. (Ramadhan, 2019)

Penelitian ini bertujuan bagaimana sikap masyarakat terhadap adanya kemunculan Ibu Kota Baru dan mengkaji manfaat apa saja yang berdampak kepada masyarakat jika adanya ibu kota negara tersebut

rumusan masalah yang digali saat ini bagaimana sikap masyarakat terhadap adanya ibu kota negara atau adakah culture shock yang terjadi dimasyarakat

2. Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai kebijakan pemindahan ibu kota negara di Indonesia telah dikaji dengan fokus dan pendekatan yang beragam, mulai dari perspektif konstitusional, spasial ekologis, hingga persepsi publik. Fikri Hadi dan Rosa Ristawati menelaah pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan Presiden dalam perspektif konstitusi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa konsep "ibu kota" di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak selalu sama dengan negara lain, misalnya Belanda dan Malaysia yang memisahkan antara ibu kota dan pusat pemerintahan. Selain itu, studi ini menyimpulkan bahwa secara konstitusional Presiden RI tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memindahkan ibu kota; Presiden pada dasarnya berwenang mengajukan usul, namun keputusan

pemindahan harus dibahas bersama dan memperoleh persetujuan parlemen (Fikri Hadi).

Selanjutnya, Muhammad Yahya (2018) meneliti tema pemindahan ibu kota negara menuju negara maju dan sejahtera dengan menekankan pendekatan spasial, ekologi, dan teritorial. Dalam kajiannya, Jakarta diposisikan sebagai salah satu bahan pertimbangan penting untuk dianalisis sebagai dasar diskusi mengenai urgensi dan konsekuensi kebijakan pemindahan ibu kota (Yahya, 2018).

Sementara itu, penelitian mengenai persepsi publik terhadap rencana kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia menggunakan metode kajian kepustakaan dan menunjukkan dimensi penerimaan masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa 67,31% masyarakat memiliki tingkat pengetahuan tentang rencana pemindahan ibu kota, 51,92% mengetahui alasan pemindahan, 42,31% mengetahui dampaknya, dan 57,69% masyarakat menyatakan setuju/menerima kebijakan pemindahan ibu kota. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa isu pemindahan ibu kota tidak hanya diperdebatkan pada ranah hukum dan perencanaan wilayah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan serta penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut.

2.2 Teori Kewenangan Menurut Philipus M. Hadjon

Untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam kebijakan pemindahan ibu kota, teori kewenangan Philipus M. Hadjon dapat digunakan. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang sah karena diberikan oleh hukum, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus punya dasar legalitas.

Sumber kewenangan dibagi menjadi atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah kewenangan asli dari UUD/UU, delegasi pelimpahan kewenangan disertai tanggung jawab, sedangkan mandat pelimpahan pelaksanaan tetapi tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Dalam konteks pemindahan ibu kota, teori ini membantu menilai apakah tindakan Presiden merupakan kewenangan yang melekat atau harus melalui persetujuan lembaga lain sesuai aturan perundang-undangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena pada Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana sikap masyarakat terhadap kehadiran ibu kota negara baru apakah akan berdampak positif atau negatif. Artikel ini juga menggunakan metode penelitian yang mengambil data dari buku, literatur, artikel maupun jurnal, dan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis serta mencari dari beberapa berita terpercaya. Data yang diperlukan diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mempelajari referensi-referensi jurnal, artikel, dan browsing internet, serta literature review yang berhubungan dengan analisis sistem.

Juga data yang diperlukan dikumpulkan dengan teknik mempelajari melalui media cetak dan elektronika. Hal ini dilakukan secara manual atau online

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Masyarakat dan Komunitas

Pengertian Masyarakat komunitas bahasa Yunani merupakan persahabatan. Sebagai cerminan kata tersebut, bahkan Aristoteles mengemukakan bahwa manusia yang hidup bersama masyarakat karena mereka menikmati kerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat bahasa Inggris atau juga komunitas. Secara kajian etimologi “community” berasal dari komunitas yang berakar ke *comune* atau *commune*. Community mempunyai dua arti sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama sebagai suatu pemukiman yang terkecil di atasnya ada kota kecil (*town*), dan di atas kota kecil ada kota atau kota besar (*city*). Hillery (1995) dan Lewis (1977) telah menyimpulkan banyak literatur dan mengusulkan empat komponen utama dalam mengartikan konsep komunitas. Pertama bahwa komunitas melibatkan manusia. Wilayah dan tempat tinggal juga menjadi bagian dari pembangunan masyarakat sekitar. Tetapi, tidak semua penulis menambahkan wilayah, tanah, atau batas wilayah definisi komunitas mereka. Wilkinson (1986) berpendapat bahwa komunitas adalah manusia yang hidup bersama kehidupan setempat dengan batasan wilayah yang tidak terlihat. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa komunitas adalah sebuah proses alamiah dimana orang-orang yang hidup bersama untuk memaksimalkan kepentingan mereka, Hobbes merasa bahwa kepentingan diri sendiri dapat ditemukan kelompok. Pendapat lain mendapatkan bahwa komunitas diartikan sebagai kelompok kecil penduduk, yang bersifat mandiri dan yang satu berbeda dengan lainnya. Komunitas memiliki kesadaran kelompok yang kuat. Komunitas tidak terlalu besar sehingga dapat saling mengenal individu tetapi tidak terlalu kecil sehingga dapat berusaha bersama secara mudah dan saling bekerja sama sehingga memunculkan Komunitas bersifat homogen

Dari Ensiklopedia Indonesia merupakan, istilah “masyarakat” sekurang-kurangnya mengandung tiga pengertian : Sama dengan *gesellschaft*, yakni bentuk tertentu kelompok berdasarkan tolak ukur yang tepat, yang diterjemahkan sebagai masyarakat patembayan bahasa Indonesia. Sementara kelompok sosial lain yang masih mendasarkan pada ikatan naluri kekeluargaan disebut *gemeinschaft* atau masyarakat paguyuban. Merupakan keseluruhan “masyarakat manusia” meliputi seluruh kehidupan bersama. Istilah ini dihasilkan dari perkembangan ketergantungan manusia yang pada masa terakhir ini sangat dirasakan. Menunjukkan suatu tata

kemasyarakatan tertentu dengan ciri sendiri dan suatu yang relative, seperti masyarakat barat, masyarakat kuno yang merupakan kelompok suku yang belum banyak berhubungan dengan dunia sekitarnya. Berdasarkan pengertian diatas dapatlah disebutkan kelompok masyarakat yang dicirikan hubungan manusianya serta nilai social yang berlaku sebagai berikut. mata pencaharian, seperti masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang, dan lain-lain, lingkungan tempat tinggalnya seperti masyarakat hutan, pantai/pesisir. tingkat kehidupan ekonomi seperti masyarakat miskin yang dibedakan dengan masyarakat kaya tingkat pendidikan seperti masyarakat terpelajar, berpengetahuan yang dibedakan dengan masyarakat awam penataan lingkungan /permukiman masyarakat seperti masyarakat desa, kota , metropolitan. lingkungan pergaulan agama seperti ulama, santri, gereja. tingkat peradaban seperti masyarakat madani, sebagai masyarakat yang beradab tingkat kehidupan social seperti masyarakat maju, tertinggal dan sebagainya. jenis kelamin yang dibedakan antara perempuan dengan laki-laki. Dari contoh pengelompokan masyarakat seperti di atas konteks pemberdayaan masyarakat maka menjadi fokus perhatian lebih ditujukan kepada kelompok masyarakat yang masih perlu ditingkatkan lagi mengingat kondisi masyarakat tidak berdaya. Konsep komunitas masyarakat yang baik mengandung Sembilan nilai (talizi, 1990 : 57-58) tiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasarkan hubungan pribadi. Komunitas mempunyai hak, kewenangan, dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri. Memiliki pandangan kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. pokok kekayaan yang merata, setiap orang berkesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya. Kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif mengurus kepentingan bersama. Komunitas member makna kepada anggotanya sejauh manakah pentingnya komunitas bagi seorang anggota. Di komunitas dimungkinkan adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat. Di komunitas, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin pada yang berkepentingan Di komunitas bisa terjadi konflik, namun komunitas memiliki kemampuan untuk managing conflict Drs.H.Roesmidi,M.M buku pemberdayaan masyarakat pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya. Dengan kata lain, masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia, yang lazim disebut dengan sistem kemasyarakatan. Emile Durkheim (1951) menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Cara yang baik untuk mengerti tentang masyarakat adalah dengan menelaah ciri-ciri pokok dari masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu Manusia yang hidup bersama Secara teoritis, jumlah manusia yang hidup bersama itu ada dua orang. Di ilmu-ilmu sosial, khususnya

sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Bergaul selama jangka waktu cukup lama Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan. (Subarjo, n.d)

4.2 Budaya sebagai Sistem Makna

Pengertian Budaya Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal- hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari kata latin colere yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata culture juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia¹ . Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kuntjaraningrat bahwa “kebudayaan” berasal dari kata sansekerta buddhayah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal- hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi- daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal. Kuntjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gaagsan, nilai- nilai peraturan Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, hasil karya manusia. Seorang ahli bernama Ralph Linton yang memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari- hari : “kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan”.

Jadi kebudayaan menunjuk pada berbagai aspek kehidupan, istilah ini meliputi cara- cara berlaku, kepercayaan- kepercayaan dan sikap- sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Selain tokoh diatas ada beberapa tokoh antropologi yang mempunyai pendapat berbeda tentang arti dari budaya atau Culture. Sementara Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmanilah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.

Tylor mendefinisikan kultur sebagai suatu keseluruhan yang kompleks termasuk didalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat, sedangkan Kroeber dan Kluckhohn merumuskan definisi kultur dengan pola- pola tingkah laku dan pola- pola untuk bertindak laku, baik yang eksplisit

maupun yang implisit yang diperoleh dan diperoleh melalui simbol-simbol yang membentuk pencapaian yang khas dari kelompok- kelompok manusia, termasuk perwujudannya, Linton menerjemahkan budaya sebagai keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu⁸. Salah satu tokoh yang memberikan pandangan tentang kebudayaan serta telah jauh memberikan landasan berfikir tentang arti budaya adalah Clifford Geertz, menurutnya kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu menggambarkan bagaimana dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historic, diwujudkan dalam bentuk- bentuk simbolik

4.3. IKN sebagai Pusat Pemerintahan Baru

Ibu kota negara atau yang disebut sekarang adalah IKN merupakan bagian dari provinsi ataupun tepat administratif yang menjadi tempat kedudukan pusat pergerakan administrasi negeri, baik dari sektor individu maupun kelompok, pergerakan ekonomi diindonesia sekarang masih terpusat dibagian jawa masih belum merata secara penuh Ibu kota mempunyai peranan penting dalam aspek kegiatan pemerintahan, mempunyai fungsi utama yakni pusat kekuasaan politik, ibu kota juga mencerminkan sisi karakter atau ciri khas yang unik dalam

Kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara merupakan upaya dalam mendorong pemerataan sector pembangunan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menjadi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan negara dapat dikatakan maju dan berkembang apabila ada pembangunan serta pengolahan secara teoat tidak meruhkan pihak, dalam pengelolaan ibu kota merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan perhitungan supaya tidak memunculkan permasalahan yang dihadapi.

Ibu Kota baru memberikan daya tarik nusantara di mata dunia internasional, dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai pendapatan bagi negara melalui aliran investasi dan pariwisata. Meskipun di sisi lain pembangunan dan pembebasan lahan ibu kota merupakan pekerjaan yang tidak mudah, karena pada akhirnya akan menginginkan adanya hubungan antara penduduk lokal dengan pe ndatang yang berimplikasi pada aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi, baik dalam bentuk eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif, untuk menuju masyarakat yang maju di kota yang baru .yang akan memajukan sektor penamaan yang terjadi menjadikan adanya destinasi wilayah baru yang hingga sekarang belum tercapai sehingga kedepannya diindonesia memiliki mempunyai berbagai pilihan alternatif dalam memastikan sistem administrasi yang muda.

5. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemindahan Ibu Kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran investasi dan pariwisata. Meskipun di sisi lain relokasi ibu kota bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena pada akhirnya akan menginginkan integrasi antara penduduk lokal dengan pendatang yang berimplikasi pada aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi, baik dalam bentuk eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif, untuk menuju masyarakat baik. Penulis mengidentifikasi dari adanya pemindahan ibu kota masyarakat suku adat menerima adanya ibu kota yang baru karena bisa menjadikan homogenitas dalam berbudaya yang akan meningkatkan unsur sosial budaya yang ada

Daftar Pustaka

- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, R. S. S., & Basah, S. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Cet. ke-11). Gadjah Mada University Press.
- Hadi, F., & Ristawati, R. (2020). *Pemindahan ibu kota Indonesia dan kekuasaan presiden dalam perspektif konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 17(3), 530–557.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2020, February 26). *Pembangunan ibu kota negara libatkan masyarakat lokal hingga kembangkan sektor industri digital dan inovasi*.
- Mantalcán, V. (2022, January 22). *Megaprojek IKN, 20.000 masyarakat adat tersingkir dan dugaan “hapus dosa” korporasi*. Kompas.com.
- Portal Masyarakat. (n.d.). *Pengertian masyarakat*.
- Purwaningsih, D. (2019, August 5). *Dampak sosial pemindahan ibu kota terhadap masyarakat adat*. Greeners.co.
- Ramadhan, M. R. (2019, June 10). *Paradigma pemindahan ibu kota negara*. BEM FEB UGM.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara. (2021). *Analisis perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur (event study pada sektor property & real estate yang listing di BEI)* [Karya ilmiah/skripsi, Repository STIE PGRI Dewantara].
- Widyastuti, R. A. (2019, August 18). *Pemindahan ibu kota, ini pentingnya masyarakat lokal dilibatkan*. Tempo.co.
- Yahya, M. (2018). *Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 14(1), 21–30.